

Laporan Tahunan 2025



**Mahkamah Agung
Republik Indonesia**



Pengadilan Terpercaya,
Rakyat Sejahtera





Pengadilan Terpercaya,Rakyat Sejahtera

Tema ini merefleksikan nilai dasar dan arah kebijakan Mahkamah Agung dalam mewujudkan peradilan yang berintegritas dan berpihak pada kepentingan masyarakat pencari keadilan. Makna “Pengadilan Terpercaya” menegaskan kewajiban lembaga peradilan untuk menjunjung tinggi integritas dan independensi dalam setiap penyelenggaraan penegakan hukum. Sejalan dengan hal tersebut, Mahkamah Agung dalam beberapa tahun terakhir secara konsisten menempatkan penguatan integritas sebagai agenda utama reformasi peradilan guna menjamin tegaknya keadilan dan terpeliharanya kepercayaan publik. Kepercayaan publik terbentuk melalui konsistensi sikap aparatur peradilan serta penyelenggaraan proses peradilan yang objektif dan berkeadilan. Pengadilan yang terpercaya, dengan demikian, adalah pengadilan yang mampu memberikan kepastian hukum dan menjamin kesetaraan di hadapan hukum sehingga setiap putusan yang dihasilkan memiliki legitimasi dan memenuhi rasa keadilan.



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Laporan Tahunan 2025

**Pengadilan Terpercaya,
Rakyat Sejahtera**

Tabel Rasio Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2025

No.	Produktivitas	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer	Peradilan TUN	Pengadilan Pajak	Jumlah
1.	Perkara diputus pengadilan tingkat pertama	2.168.669	606.112	2.331	1.743		2.778.855
	Jumlah hakim	4.037	2.463	148	384		7.032
	Rasio	1:537	1:246	1:16	1:5		1:395
	Rata-rata produktivitas tiap hakim	1612	738	47	14		1.186
2.	Perkara putus pengadilan tingkat banding	31.808	3.395	382	937	15.333	51.855
	Hakim	664	399	31	62	70	1.226
	Rasio	1:48	1:9	1:12	1:15	1:219	1:42
	Rata-rata produktivitas tiap hakim	144	26	37	45	657	127

Tabel Rasio Kinerja Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI Tahun 2025

Jumlah	Pidana	Perdata	Agama	Militer	TUN	Jumlah
Jumlah perkara putus	18.396	9.339	1.208	318	8.712	37.973
Jumlah hakim agung	15	15	5	4	9	48
Rasio hakim agung dengan perkara	1:1.226	1:623	1:242	1:80	1:968	1:791
Rerata produktivitas tiap hakim	3.679	1.868	725	239	2.904	2.373

KONTRIBUSI KEUANGAN PERKARA TERHADAP KEUANGAN NEGARA

Pada bagian ini diuraikan kontribusi keuangan perkara terhadap keuangan negara yang berasal dari PNPB layanan penanganan perkara, putusan peninjauan kembali perkara pajak, serta penghukuman denda dan uang pengganti putusan pidana.

Kontribusi dari PNPB

Penerimaan negara bukan pajak dari layanan penanganan perkara pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 seperti tergambar pada tabel berikut.

No	Akun		Realisasi (Rp)
1.	425231	Pendapatan pengesahan surat di bawah tangan	130.740.000
2.	425232	Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada panitera badan peradilan	3.020.180.000
3.	425233	Pendapatan ongkos perkara	26.561.415.000
4.	425239	Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya	57.360.997.242
Jumlah			87.073.332.242

Jumlah PNPB Fungsional tahun 2025 meningkat 15,88% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang berjumlah Rp75.143.960.113

Kontribusi dari Putusan Pengadilan

Putusan Peninjauan Kembali Perkara Pajak

Mahkamah Agung melalui putusan peninjauan kembali perkara pajak telah menetapkan pajak yang harus dibayarkan kepada negara senilai Rp20.891.807.732.972,00 (dua puluh triliun delapan ratus sembilan puluh satu miliar delapan ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) dan USD107.434.098,67 (seratus tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu sembilan puluh delapan dolar Amerika enam puluh tujuh sen).

Putusan Perkara Pidana, Pidana Khusus, Pidana Militer

Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya yang memiliki kewenangan mengadili perkara pidana, selain menjatuhkan pidana, juga mewajibkan terdakwa membayar denda dan uang pengganti. Sepanjang tahun 2025 denda dan uang pengganti yang harus dibayarkan oleh terdakwa adalah sebagai berikut.

No.	Jenis	Jumlah (Rp)
1.	Uang denda	56.674.641.200.942
2.	Uang pengganti	9.027.617.922.872
	Jumlah	65.702.259.123.814

Pengelolaan Keuangan Perkara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

Biaya Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung

No.	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1.	Saldo awal tahun 2025	29.237.240.702	
2.	Penerimaan tahun 2025	25.845.610.829	
3.	Penggunaan biaya proses 2025		22.812.456.024
4.	Saldo akhir 2025		32.270.395.507
	Jumlah	55.082.851.531	55.082.851.531

Biaya Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding

No.	Jenis Perkara	Jumlah perkara	Biaya Proses	Jumlah (Rp)
1.	Peradilan umum (perdata)	12280	150.000	1.842.000.000
2.	Peradilan agama (perdata)	3379	150.000	506.850.000
3.	Peradilan tata usaha negara	940	250.000	235.000.000
	Jumlah			2.583.850.000



Laporan Tahunan 2025

Pengadilan Terpercaya, Rakyat Sejahtera

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13
Jakarta Pusat - DKI Jakarta, Indonesia 10110
(021) 3843348, 3810350, 3457661
persuratan@mahkamahagung.go.id

